

**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

TAHUN 2023



*PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
JI. PERWIRA NO 15
BARABAI*



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah di Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Izin Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2023, dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja ini dibuat dalam setiap tahun adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan alat ukur untuk melaksanakan pembangunan pada SKPD dalam 1 (satu) tahun ke depan atau dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mana disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami berharap , agar kiranya Rencana Kerja yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Barabai , Pebruari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



Drs. WAHYUDI RAHMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19731010 199303 1 003



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V Penutup	33



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyatakan "ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah".

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebelum dokumen Rencana Kerja (Renja) ditetapkan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Renstra) tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Perkembangan sistem perencanaan dewasa ini yang paling dominan adalah menggunakan sistem Bottom Up, seiring dengan diterapkannya sistem anggaran yang berbasis kinerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan demikian adanya dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja bagi setiap SKPD adalah merupakan kebutuhan yang riil.

Untuk mencapai Kondisi yang lebih baik lagi dalam pencapaian kinerja di tahun 2023 yakni dalam upaya mewujudkan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien melalui manajemen yang



propesional, tentu saja masih diperlukan kerja keras dari aparat dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam menyikapi hal yang demikian maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dengan mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah/Aparatur Sipil Negara untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mengoptimalkan Manajemen Administrasi Kepegawaian Daerah dengan berupaya untuk tetap menjalankan aktifitas kerjanya dengan tetap mengacu pada Prinsip - prinsip Good Governance.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk :

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2023

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh sebuah organisasi. Maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun dengan tujuan :

- a. Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan



- c. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD berupa latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Pada sub Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah, memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja



Perangkat Daerah tahun yang lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang *memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang *tidak* memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang *melebihi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah memuat uraian tentang

- a. Sejauh mana tingkat pelayanan Perangkat Daerah
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional
- d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD memuat tentang

1. Proses yang dilakukan yaitu membanding antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat memuat tentang:



1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Uraian tentang jumlah program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan tahun mendatang

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup diuraikan mengenai :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU dan CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Lembar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
05	Kepegawaian										
06 01 11	Program Pembinaan Keadudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN	Persentase SKPD yang memberikan tindakan dan melaporkan Pelanggaran disiplin ASN	100%	11%							program ini tidak ada di tahun 2026
06 01 11 01	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang selesai diproses tindakan hukumnya.	3	7							
		Jumlah penurunan pelanggaran disiplin.	0	0							
		Jumlah proses pemberian izin perkawinan/perceraian yang sesuai prosedur dan tepat waktu.	15	24							
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan faham	0	0							
06 01 12	Program Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN	Persentase pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya selesai		97%							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
06 01 12 6	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala, Surat Izin Cuti PNS, yang diproses akurat dan selesai tepat waktu		1022							
		Jumlah administrasi kepegawalan (Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, SK Pensiun dll) yang diproses akurat dan selesai tepat waktu		739							
		Jumlah PNS/ASN yang diusulkan untuk mendapatkan Plagam Penghargaan		216							
06 01 13	Program Pengembangan Aparatur Daerah	Persentasi proses SK/dokumen yang diselesaikan tepat waktu	100%	105%							program ini tidak ada di tahun 2026
06 01 13 3	Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	Jumlah calon JPT yang lulus seleksi sesuai prosedur	0	70							kegiatan ini tidak ada di tahun 2026
06 01 13 7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi PNS Di Dalam Kabupaten, Surat Rekomendasi Mutasi Keluar/Masuk, dan SK Dalam Jabatan Fungsional PNS akurat dan selesai tepat waktu		231							

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra/Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)	12
06 01 13 8	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan PNS/ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS, SK Penambahan Masa Kerja, dan SK Pengangkatan menjadi PNS yang diproses akurat dan selesai tepat waktu		603							
06 01 15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Persentase Aparatur yang lulus diklat dengan kriteria baik dan pengembangan karir yang terpola		80%							program ini tidak ada di tahun 2026
06 01 15 10	Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat prajabatan, PIM, Fungsional/Tupoksi dengan hasil baik		115							kegiatan ini tidak ada di tahun 2026
06 01 15 11	Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar. Ijin belajar dan pencantuman gelar akademik		177							kegiatan ini tidak ada di tahun 2026
06 01 17	Program Pemutakhiran Data, Formasi dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar/ikatan dinas sesuai dengan tupoksi	0	40%							program ini tidak ada di tahun 2026

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
06 01 17 1	06 01 17 1	Jumlah ASN yang datanya akurat	0	987							kegiatan ini tidak ada di tahun 2026
06 01 17 2	06 01 17 2	Jumlah peserta seleksi CPNS/ASN yang telah diverifikasi	0	289							kegiatan ini tidak ada di tahun 2026
5 3 2	5 3 2	Indeks kepuasan masyarakat			83	83	100	85	85	100	
		Indeks NSPK			83	83	100	85	85	100	
5 3 2 2 01	5 3 2 2 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			100	100	100	100	100	100	
		Persentase ASN yang lulus seleksi sesuai formasi			100	96	96	100	100	100	
		Persentase data ASN yang akurat			100	100	100	100	100	100	
5 3 2 2 01 02	5 3 2 2 01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			200	100	50	500	500	100	
5 3 2 2 01 03	5 3 2 2 01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			200	36	18	500	500	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5 3 2 2 01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen /SK usul pemberhentian yang terverifikasi sesuai ketentuan			700	1259	180	700	700	100	
5 3 2 2 01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen data profil			3500	3500	100	1000	1000	100	
5 3 2 2 02 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentasi Penetapan Mutasi dan Promosi Pegawai sesuai ketentuan			100	103	103	100	100	100	
5 3 2 2 02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen usul mutasi terverifikasi dan diproses sesuai tepat waktu			700	730	104	725	725	100	
5 3 2 2 02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen usul kenaikan Pangkat dll yang terverifikasi dan diproses selesai tepat waktu			700	715	102	600	600	100	
5 3 2 2 03 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentasi ASN yang mengikuti pengembangan dan diklat pegawai			100	81	81	35	35	100	
5 3 2 2 03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik			156	124	79	160	160	100	

Kode	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra/Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)	12
5 3 2 2 03	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen usul/data ASN yang mengikuti Diklat			438	360	82	320	320	100	
5 3 2 2 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentasi rekomendasi MP2HD dan majelis kode etik			100	90	90	100	100	100	
5 3 2 2 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan			300	0	0	200	200	100	
5 3 2 2 04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen laporan kinerja dan disiplin ASN			5	3	60	4	4	100	
		Jumlah proses pemberian izin perkawinan/perceraian yang sesuai prosedur dan tepat waktu			20	7	35	18	18	100	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian Kinerja SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD							Realisasi Capaian			Proyeksi	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(5)	(5)					(6)	(7)	
1	Persentase jabatan yang diisi ASN yang berkompeten			69%	72%	76%	80%	83%	88%	60%				72%	76%
2	Persentase ASN berkinerja minimal baik			80%	82%	85%	87%	90%	95%	80%				82%	85%
3	Nilai SAKIP perangkat Daerah			76,18	80	82	84	85	86	76,18				80	82

Analisis kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlihat berdasarkan realisasi capaian tahun 2021



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-Isu merupakan problem yang menghambat suatu tujuan dalam organisasi. Maka dari itu isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Kurangnya Profesional ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga tidak bisa diberdayakan secara optimal
- Masih adanya PNS yang menduduki jabatan tidak sesuai kompetensi
- Pembinaan dan pengembangan karier jabatan Pegawai Negeri Sipil belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan
- Penyelelarasan kompetensi PNS paska diberlakukan penghapusan pejabat struktural eselon IV menjadi tenaga fungsional

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Setuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Setuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Kepegawaian				12.480.411.251								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HST	Persentasi penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standar	%	100	4.082.022.851	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HST	Persentasi penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standar	%	100	5.208.409.925	
1.1	1.1.1		Persentasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	100	80.241.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	HST	Persentasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	%	100	41.390.700	
			Jumlah dokumen laporan capaian & ikhtisar realisasi kinerja PD	dokumen	6	80.241.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	HST	Jumlah dokumen laporan capaian & ikhtisar realisasi kinerja PD	dokumen	6	41.390.700	
2	2.1		Persentasi administrasi keuangan PD tepat waktu	%	100	3.172.721.151	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	HST	Persentasi administrasi keuangan PD tepat waktu	%	100	4.594.291.385	
2.2	2.2.1		Jumlah ASN	orang	313	3.172.721.151	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	HST	Jumlah ASN	orang	313	4.594.291.385	
3	3.1		Persentasi pegawai PD yang dilayani	%	100	58.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	HST	Persentasi pegawai PD yang dilayani	%	100	56.220.000	
3.1	3.1.1		Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	orang	100	58.300.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan luar daerah	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	orang	100	56.220.000	
4	4.1		Persentasi administrasi umum PD berjalan sesuai standar	%	100	228.077.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	HST	Persentasi administrasi umum PD berjalan sesuai standar	%	100	124.935.540	
4.1	4.1.1		Jumlah jenis komponen	jenis	25	5.097.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	HST	Jumlah jenis komponen	jenis	25	5.048.800	
4.2	4.2.1		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	5	76.278.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	HST	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	0	-	
4.3	4.3.1		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	25	13.048.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HST	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	25	12.166.340	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	HST	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	jenis	10	28.884.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	HST	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	jenis	10	4.999.800							
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HST	Jumlah exp bacaan dan perundangan yang disediakan	jenis	730	2.883.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HST	Jumlah exp bacaan dan perundangan yang disediakan	jenis	730	2.857.600							
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	HST	Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	300	25.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	HST	Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	300	5.000.000							
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diikuti	kali	70	76.386.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diikuti	kali	70	94.863.000							
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	100	139.829.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi	%	100	-							
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	HST	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	2	58.858.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	HST	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	0	-							
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HST	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	2	80.970.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	HST	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	0	-							
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi jasa penunjang urusan yang tersedia	%	100	177.394.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi jasa penunjang urusan yang tersedia	%	100	165.364.200							
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HST	Jumlah jasa surat menyurat yang digunakan	kali	12	50.839.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	HST	Jumlah jasa surat menyurat yang digunakan	kali	12	50.768.200							
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	HST	Jumlah satuan jasa internet yang dipakai	mbps	100	86.979.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	HST	Jumlah satuan jasa internet yang dipakai	mbps	100	114.596.000							
		HST	Jumlah satuan jasa komunikasi yang dipakai	menit	750			HST	Jumlah satuan jasa komunikasi yang dipakai	menit	750								
		HST	Jumlah satuan jasa listrik yang dipakai	kwh	35000			HST	Jumlah satuan jasa listrik yang dipakai	kwh	35000								
		HST	Jumlah satuan jasa sumberdaya air yang dipakai	kubik	1750			HST	Jumlah satuan jasa sumberdaya air yang dipakai	kubik	1750								
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	HST	Jumlah bahan dan alat pelayanan umum kantor	jenis	21	39.576.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	HST	Jumlah bahan dan alat pelayanan umum kantor	jenis	21	68.834.400							
		HST	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	24			HST	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	24								
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi BMD penunjang urusan yang terpelihara	%	100	225.458.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HST	Persentasi BMD penunjang urusan yang terpelihara	%	100	226.208.100							

Rancangan Awal RIKPD										Hasil Analisis Kebutuhan									
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	HST	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	16	104.762.900		HST	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	16	106.253.700							
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	HST	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	buah	2	44.400.000		HST	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	buah	2	44.400.000							
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	HST	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara / direhabilitasi	unit	2	76.296.000		HST	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara / direhabilitasi	unit	2	75.554.400							
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	HST	Indeks kepuasan masyarakat	%	87	8.398.388.400	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	HST	Indeks kepuasan masyarakat	%	87	8.392.816.700							
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	HST	Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	%	67			HST	Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	%	67								
8.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	HST	Persentase ASN yang lulus seleksi sesuai formasi	%	100	4.314.513.300	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	HST	Persentase ASN yang lulus seleksi sesuai formasi	%	100	1.258.535.750							
		HST	Persentase ASN yang ditetapkan pemberhentian	%	100			HST	Persentase ASN yang ditetapkan pemberhentian	%	100								
		HST	Persentase Data ASN yang akurat	%	100			HST	Persentase Data ASN yang akurat	%	100								
8.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	HST	Jumlah dokumen usul kebutuhan/formasi	orang	250	63.704.200	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	HST	Jumlah dokumen usul kebutuhan/formasi	orang	250	61.478.200							
8.2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	HST	Jumlah dokumen peserta seleksi ASN yang telah diverifikasi sesuai ketentuan	orang	250	3.543.805.500	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	HST	Jumlah dokumen peserta seleksi ASN yang telah diverifikasi sesuai ketentuan	orang	250	759.473.350							
8.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	HST	Jumlah dokumen/SK usul pemberhentian yang terverifikasi sesuai ketentuan	sk	700	159.694.700	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	HST	Jumlah dokumen/SK usul pemberhentian yang terverifikasi sesuai ketentuan	sk	700	150.000.000							
8.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	HST	Jumlah dokumen data profil	orang	1000	547.308.900	Pengelolaan Data Kepegawaian	HST	Jumlah dokumen data profil	orang	1000	287.584.200							
9	Mutasi dan Promosi ASN	HST	Persentase penetapan mutasi dan promosi	%	100	2.182.326.800	Mutasi dan Promosi ASN	HST	Persentase penetapan mutasi dan promosi	%	100	1.592.669.900							

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.1	Pengelolaan Mutasi ASN	HST	Jumlah dokumen usul mutasi terverifikasi dan diproses selesai tepat waktu	SK	650	1.472.723.200	Pengelolaan Mutasi ASN	HST	Jumlah dokumen usul mutasi terverifikasi dan diproses selesai tepat waktu	SK	650	764.135.700	
9.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	HST	Jumlah dokumen usul kenaikan pangkat di yang terverifikasi dan diproses selesai tepat waktu	SK	650	709.603.600	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	HST	Jumlah dokumen usul kenaikan pangkat di yang terverifikasi dan diproses selesai tepat waktu	SK	650	828.533.600	
10	Pengembangan Kompetensi ASN	HST	Persentasi ASN yang mengikuti pengembangan dan diklat pegawai	%	45	1.500.310.800	Pengembangan Kompetensi ASN	HST	Persentasi ASN yang mengikuti pengembangan dan diklat pegawai	%	45	892.034.050	
10.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	HST	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik	orang	165	372.527.300	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	HST	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar, ijin belajar dan pencantuman gelar akademik	orang	165	498.009.950	
10.2	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dalam dan luar daerah	Jumlah dokumen usul/data ASN yang mengikuti diklat	orang	350	1.127.783.500	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dalam dan luar daerah	Jumlah dokumen usul/data ASN yang mengikuti diklat	orang	350	394.024.100	
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	HST	Persentasi rekomendasi kode etik	%	100	401.237.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	HST	Persentasi rekomendasi kode etik	%	100	189.577.600	
		HST	Persentasi SKPD yang menegakkan disiplin	%	100			HST	Persentasi SKPD yang menegakkan disiplin	%	100		
11.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	HST	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan	orang	200	63.639.200	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	HST	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan	orang	200	34.683.000	
11.2	Pembinaan Disiplin ASN	HST	Jumlah dokumen laporan kinerja dan disiplin ASN	orang	4	337.398.300	Pembinaan Disiplin ASN	HST	Jumlah dokumen laporan kinerja dan disiplin ASN	orang	4	154.894.600	
		HST	Jumlah proses pemberian izin perkawinan / perceraihan yang sesuai prosedur dan tepat waktu	orang	18			HST	Jumlah proses pemberian izin perkawinan / perceraihan yang sesuai prosedur dan tepat waktu	orang	18		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Ket : Ditelaah dari hasil Musrenbang Kec yang telah dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah

Untuk usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat di tahun 2023 tidak ada dari hasil musrenbang baik musrenbang kecamatan maupun musrenbang kabupaten



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Peningkatan profesionalisme PNS daerah
2. Pengembangan teknologi informasi
3. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Perangkat Daerah : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)**

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
	1. Peningkatan profesionalisme PNS daerah 2. Pengembangan teknologi informasi 3. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan		
B	Provinsi		
	1. Peningkatan profesionalisme PNS daerah 2. Pengembangan teknologi informasi 3. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2023
Meningkatkan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	58
Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian yang transparan, akuntabel dan	Indeks RB perangkat daerah	32,5



profesional		
-------------	--	--

Sebagai bagian integral dari penetapan visi, misi dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
Meningkatnya pemenuhan kompetensi ASN pada jabatan	Persentase jabatan yang diisi ASN yang berkompeten	76%
Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN berkinerja minimal baik	85%
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian	Nilai SAKIP perangkat Daerah	82

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan profesionalisme ASN	Meningkatnya pemenuhan kompetensi ASN pada jabatan
Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian yang transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya kinerja ASN
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan kepegawaian



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2023 sebanyak 2 program dan 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan:
 - Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	Kepegawaian				12.480.411.251					26.351.237.761
1	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HST	%	100	4.082.022.851	APBD Kab. HST	%	100	16.601.237.761
1	2	1	HST	%	100	80.241.000	APBD Kab. HST	%	100	88.519.486
1	2	1	HST	dokumen	6	80.241.000	APBD Kab. HST	dokumen	6	88.519.486
1	2	2	HST	%	100	3.172.721.151	APBD Kab. HST	%	100	14.793.378.997
1	2	1	HST	orang	30	3.172.721.151	APBD Kab. HST	orang	300	14.793.378.997
1	2	5	HST	%	100	58.300.000	APBD Kab. HST	%	100	20.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10				
1	2	5	11	Jumlah pegawai mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	Dalam dan luar daerah	orang	100	58.300.000	APBD Kab. HST	20.000.000	100	orang	100	20.000.000
1	2	6	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	HST	%	100	228.077.800	APBD Kab. HST	1.035.800.000	100	%	100	1.035.800.000
1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	HST	jenis	25	5.097.000	APBD Kab. HST	18.000.000	25	jenis	25	18.000.000
1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	HST	unit	5	76.278.600	APBD Kab. HST	150.000.000	5	unit	5	150.000.000
1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	HST	jenis	25	13.048.300	APBD Kab. HST	50.000.000	25	jenis	25	50.000.000
1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	HST	jenis	10	28.884.400	APBD Kab. HST	40.000.000	10	jenis	10	40.000.000
1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	HST	jenis	730	2.883.500	APBD Kab. HST	2.800.000	730	jenis	730	2.800.000
1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	HST	orang	300	25.500.000	APBD Kab. HST	25.000.000	300	orang	300	25.000.000
1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	kali	70	76.386.000	APBD Kab. HST	750.000.000	70	kali	70	750.000.000
1	2	7	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	HST	%	100	139.829.400	APBD Kab. HST	55.000.000	100	%	100	55.000.000
1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	HST	unit	2	58.858.800	APBD Kab. HST					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	6	HST	unit	2	80.970.600	APBD Kab. HST	unit	2	55.000.000
1	2	8	HST	%	100	177.394.600	APBD Kab. HST	%	100	248.539.278
1	2	1	HST	kali	12	50.839.000	APBD Kab. HST	kali	12	63.539.278
1	2	2	HST	mbps	100	86.979.600	APBD Kab. HST	mbps	100	140.000.000
			HST	menit	750		APBD Kab. HST	menit	750	
			HST	kwh	35000		APBD Kab. HST	kwh	35000	
			HST	kubik	1750		APBD Kab. HST	kubik	1750	
1	2	4	HST	jenis	21	39.576.000	APBD Kab. HST	jenis	21	45.000.000
			HST	OB	24		APBD Kab. HST	OB	24	
1	2	9	HST	%	100	225.458.900	APBD Kab. HST	%	100	360.000.000
1	2	2	HST	unit	16	104.762.900	APBD Kab. HST	unit	16	75.000.000
1	2	9	HST	buah	2	44.400.000	APBD Kab. HST	buah	2	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1	2	10	HST	unit	2	76.296.000	APBD Kab. HST	unit	2	110.000.000	
2	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	HST	%	87	8.398.388.400	APBD Kab. HST	%	88	9.750.000.000	
		Indeks kepuasan masyarakat	HST	%	67			%	88		
2	2	1	HST	%	100	4.314.513.300	APBD Kab. HST	%	100	3.045.000.000	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	HST	%	100		APBD Kab. HST	%	100		
		Persentasi ASN yang lulus seleksi sesuai formasi	HST	%	100		APBD Kab. HST	%	100		
		Persentasi ASN yang ditetapkan pemberhentian	HST	%	100		APBD Kab. HST	%	100		
2	2	1	HST	orang	250	63.704.200	APBD Kab. HST	orang	250	28.000.000	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	HST	orang	250			orang	250		
2	2	1	HST	orang	250	3.543.805.500	APBD Kab. HST	orang	250	2.850.000.000	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	HST	orang	250			orang	250		
2	2	1	HST	sk	700	159.694.700	APBD Kab. HST	sk	700	100.000.000	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	HST	sk	700			sk	700		
2	2	1	HST	orang	1000	547.308.900	APBD Kab. HST	orang	1000	67.000.000	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	HST	orang	1000			orang	1000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
2	2	2	HST	%	100	2.182.326.800 HST	APBD Kab. HST	%	100	975.000.000
2	2	1	HST	SK	650	1.472.723.200 HST	APBD Kab. HST	SK	650	850.000.000
2	2	2	HST	SK	650	709.603.600 HST	APBD Kab. HST	SK	650	125.000.000
2	2	3	HST	%	45	1.500.310.800 HST	APBD Kab. HST	%	45	5.480.000.000
2	2	3	HST	orang	165	372.527.300 HST	APBD Kab. HST	orang	165	470.000.000
2	2	5	Dalam dan luar daerah	orang	350	1.127.783.500 HST	APBD Kab. HST	orang	350	5.010.000.000
2	2	4	HST	%	100	401.237.500 HST	APBD Kab. HST	%	100	250.000.000
2	2	4	HST	%	100			%	100	
2	2	4	HST	orang	200	63.839.200 HST	APBD Kab. HST	orang	150	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
2	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen laporan kinerja dan disiplin ASN	HST	orang	4	337.398.300	APBD Kab. HST		orang	3	180.000.000
		Jumlah proses pemberian izin perkawinan / perceraian yang sesuai prosedur dan tepat waktu	HST	orang	18		APBD Kab. HST		orang	15	
TOTAL							12.480.411.251				26.351.237.761



BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program kegiatan Pembangunan yang telah disusun sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian Prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan harus didukung oleh Sumber daya Manusianya, yakni Sumber Daya Manusia yang cukup dan Profesional serta harus pula didukung oleh Fasilitas atau Sarana prasarana yang memadai.

Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki (28 orang pegawai memberikan pelayanan administratif kepada sekitar 3.831 PNSD yang tersebar dalam seluruh satuan kerja).

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja ini dibuat sebagai Acuan atau Pedoman untuk meningkatkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Effisien melalui Managemen yang Profesional.

Rencana Kerja ini merupakan alat ukur untuk pelaksanaan Pembangunan pada SKPD untuk 1 (satu) Tahun Anggaran yang selanjutnya dievaluasi dimana dari Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dari gambaran yang demikian tentunya kebijakan penambahan jumlah personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah perlu dijadikan agenda untuk diupayakan kemungkinannya.



tak lupa diucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan semua pihak sehingga terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini.

Barabai, Februari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



Drs. WAHYUDI RAHMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19731010 199303 1 003